

**BAB V**  
**INTERPRETASI**

**Aspek Temuan**

Pada BAB ini pelbagai data temuan studi di lapangan yang relevan dan memiliki korelasi dengan topik penelitian akan diinterpretasikan sehingga ditemukan titik singgung antara temuan data dengan teori-teori tertentu. Terdapat dua temuan yang dihasilkan oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah untuk menjawab dua agenda penelitian. Dua temuan itu terkait dengan profil pengajian eksekutif yang berbentuk pengajian periodik, kontinyu dan tematik. Berikut ini temuan tersebut;

*Pertama*, segmen pengajian eksekutif ICMI ORWIL JATIM adalah terdiri dari lapisan eksekutif di wilayah lingkungan Jawa Timur. Mereka datang dari beragam profesi dan keahlian yang tersebar dalam aneka jenis lapangan kehidupan. Pluralisme segmen ini di satu sisi merefleksikan inklusifisme pengajian yang tidak terpatok pada sekat-sekat organisasi keagamaan tertentu. Umumnya secara populer mereka, para peserta pengajian, termasuk bagian dari apa yang secara sosiologis lazim disebut kelas menengah. Segmen kelas menengah muslim yang terlibat dalam dan ikut mewarnai pengajian eksekutif sebagian adalah kaum profesional; dokter, wartawan, notaris, advokat dan pengacara. Sebagian yang lain adalah aktor birokrasi, Militer, dan pegiat atau aktor bisnis yang berkiprah di sektor perusahaan negara (BUMN). Tidak

ketinggalan pula dari sektor swasta, baik dari lingkup pengusahanya, wiraswastawan maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Kelompok lain yang terlibat dalam pengajian ini adalah kalangan akademisi; dosen maupun mahasiswa. Keseluruhan stratum sosiologis segmen itu termasuk bagian dari lapisan komunitas masyarakat yang telah mengalami mobilitas vertikal. Proses mobilitas itu terjadi baik pada level ekonomi, sosial budaya maupun level edukasi. Pada tataran itulah kelas menengah muslim mengalami kenaikan stratum sosiologis sebagai lapisan strategis yang memikul tanggungjawab moral dan intelektual memikirkan agenda bangsa, negara dan agama.

*Kedua*, materi yang menjadi topik dan pokok bahasan dalam pengajian eksekutif bersifat tematik. Tema itu diangkat dan dikemas dalam bentuk tema-tema aktual yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tema-tema keagamaan itu diformulasikan sedemikian rupa dengan tidak menonjolkan aspek normatifnya saja, namun berusaha mengkaitkan dengan dimensi persoalan tertentu yang dilibati dan digeluti keseharian segmen pengajian. Secara ringkas dari pelbagai tema itu terdapat beberapa benang merah yang dapat ditarik. Pertama, berusaha mendekati agenda atau tema kehidupan riil dari sudut tekhnik namun tidak mengabaikan dimensi semangat atau nilai-nilai. Kedua, kedua pendekatan pada poin satu tadi dikombinasikan secara utuh atau integral. Ketiga, nilai-nilai Islam yang bersifat absolut dan mutlak itu direlevansikan dengan realitas historis perubahan atau

dinamika kemajuan seperti terpantul pada produk-produk kebudayaan. Keempat, terdapat suatu pengakuan bahwa pengembangan SDM umat Islam mesti diarahkan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Teknologi dipersepsi sebagai instrumen teknik produk kreativitas kebudayaan yang netral. Implikasi negatif sebuah kebudayaan teknologis menuntut dikembangkannya model-model baru terhadap pemahaman keagamaan dengan mendasarkan pada aspek nilai dari agama yang sifatnya mutlak, universal dan abadi. Dengan pola dan kerangka berfikir demikian, agama akan senantiasa aktual dan terkait dalam pergulatan historis kemanusiaan.

#### **Timbangan Teoritik**

Uraian teoritik berikut dimaksudkan untuk meletakkan pelbagai temuan penelitian di lapangan dalam kerangka teori. Teori ini sebatas pada timbangan atau komparasi tentang relevan tidaknya temuan itu dengan formulasi fokus penelitian. Dikatakan sebagai timbangan karena ia tidak bermaksud menguji atau mengevaluasi validitas produk penelitian. Karena pengujian demikian itu berujung pada kesimpulan. Sementara penelitian dimaksud sebatas deskripsi kualitatif.

Di atas dijelaskan bahwa peserta pengajian eksklusif meliputi kalangan yang kategorinya; Pertama, para eksklusif muslim di perusahaan, industriawan, birokrasi, yayasan, lembaga Islam, organisasi islam. Kedua, mereka yang memiliki minat tinggi terhadap studi-studi ke-Islaman. Mereka bisa jadi para mahasiswa pasca sarjana, santri, wartawan, dan profesi lainnya.

Mereka adalah bagian dari kelas menengah baik karena kualifikasi tingkat edukasi, ekonomi, maupun stratum sosial budaya. Dengan begitu pengajian eksekutif diformat dan dikonstruksi untuk mewadahi kalangan eksekutif muslim dalam berdiskusi, berdebat dan mengkaji pelbagai problematika sosial kemasyarakatan untuk dicarikan solusi secara tepat dari beragam sudut pandang dan tinjauan. Terminologi eksekutif tidak dimaksudkan sebagai kerangka pengkotak-kotakan dan cermin eksklusifitas kelompok ini dari kelompok muslim lainnya sehingga perlu diwadahi tersendiri secara berbeda. Tapi penggunaan kosa eksekutif dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa mereka yang terlibat dalam komunitas pengajian adalah para eksponen kelompok masyarakat yang peduli, tanggap dan responsif terhadap kerumitan yang dialami bangsa, agama dan ummat Islam. Bagian dari mereka inilah yang turut meramaikan pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim.

Beragamnya warna yang berbeda-beda antar peserta pengajian ini dengan sendirinya mematahkan tuduhan atau keluhan eksklusifitas pengajian eksekutif. Justru terlibatnya pelbagai pihak termasuk juga kalangan birokrat kian meneguhkan makin respek dan simpatiknya kalangan pemerintah terhadap ummat Islam. Nampaknya fenomena makro sosial politik negara kian terintegrasinya ummat dengan state dapat ditilik miniaturnya pada pengajian ini. Eskponen birokrasi pemerintah tingkat I Jatim sebagian juga simpatik dan intensif mengikuti pengajian. Bahkan secara formal pembina dan pelindung pengajian adalah Gubernur Kepala Daerah.

Di satu sisi hal itu menunjukkan Islam relatif telah dapat diterima oleh banyak kalangan. Di sisi lain menegaskan kian mencairnya sekat-sekat kultural antar kelompok umat. Sekat-sekat itu bisa berupa trikotomi ala Geertz, Santri, Abangan, Priyayi, atau antara tradisional-modernis bahkan antara yang konservatif, eksklusif dan fundamentalis. Beberapa terminologi sosiologis yang terasa kurang enak itu pernah mengharu birukan perbincangan tipologi umat dalam memahami agamanya. Dari analogi pengajian eksklusif itu pula kini, tidak lagi canggung para ulama (yang dulu identik dengan kaum sarungan yang tradisional) berdampingan dengan cendekiawan (kaum modernis). Bahkan mereka tidak jarang duduk satu meja dan bersama-sama membahas pelbagai tema. Ulama tidak segan-segan mengutip teori-teori ilmiah dan sebaliknya cendekiawan juga dengan fasih melafalkan ayat-ayat suci.

Memandang fenomena itu secara optimis tidaklah terlalu berlebihan. Sebab, dalam sejarahnya tipologi-tipologi umat yang berkonotasi stereotip itu sempat membelah-belah tubuh kaum muslim menjadi terkotak-kotak yang saling mengisolasi dan curiga. Paling terasa dampaknya adalah konsep trikotomi ala Geertz. Tokoh sosiolog asing terkemuka ini pernah melakukan studi khusus tentang umat Islam Indonesia dan melihat peta sosiologis umat dalam kaca mata trikotomi; santri, priyayi dan abangan<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, dalam Roland Roberston, *Agama : Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 201.

Konsep abangan menurut Dawam Rahardjo<sup>(2)</sup>, hanya dikenal dalam kultur masyarakat Jawa. Muslim non Jawa, betapapun kurang kadar kemuslimannya akan merasa terhina disebut sebagai abangan. Karena itu dalam perkembangan yang melekat pada komunitas Jawa itulah kemudian konsep abangan kemudian dipahami sebagai "Kejawen".

Kategori santri, priyayi dan abangan ini walaupun dikenal luas sebagai konsep trikotomi yang khas dalam masyarakat Jawa, namun baru populer setelah penelitian Geertz di Pare, Kediri. Dengan begitu pengertiannya hanya populer di Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun tidak di Jawa Barat. Karena ke-Sunda-an, sebagaimana ke-Melayua-an, umumnya identik dengan kemusliman.

Sebenarnya banyak celah-celah kelemahan yang ditinggalkan oleh konsep Geertz ini, sehingga datang kritik bertubi-tubi. Meskipun demikian banyak peneliti tidak dapat meninggalkan makna penting konsep ini, walaupun mungkin sebatas menjadi inspirasi yang mengilhami lahirnya penelitian lebih lanjut, khususnya dalam komunitas Jawa. Salah satu yang dapat disebut sebagai pengkritik Geertz adalah Harsya W. Bachtiar, seorang sosiolog terkemuka Universitas Indonesia. Bagi Bahtiar<sup>3</sup>, konsep trikotomi ini menggunakan titik pijak yang lemah dalam hal kategorisasi yang dilakukan. Konsep priyayi lebih tepat bila digandengkan dengan konsep "wong cilik". Yang pertama adalah kategori tingkat keberagamaan, khususnya

---

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Prisma*, Maret, 1991. hlm. 3

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

kemusliman, sedangkan yang kedua adalah kategori stratifikasi sosial. Jika kedua kategori itu disusun dalam sebuah matriks, maka akan tampak bahwa orang-orang santri atau abangan masing-masing bisa digolongkan sebagai priyayi atau wong cilik. Dan sebaliknya wong cilik atau priyayi bisa saja santri atau abangan.

Sementara itu sejak dasawarsa 1970-an, telah dilakukan upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintahan ORBA. Dampak dari upaya berskala besar itu, dengan bantuan dana luar negeri dan dana migas, telah mengubah posisi sosial politik dan sikap budaya ummat Islam, demikian pula telah menimbulkan perkembangan baru persepsi pemerintah terhadap peranan masyarakat, terutama ummat Islam yang dari segi pemeluk agama, merupakan golongan mayoritas.

Pembangunan juga telah telah memungkinkan ummat Islam melakukan mobilitas, horisontal maupun terlebih vertikal. Dengan mobilitas vertikal telah mengubah posisi dan stratifikasi sosial masyarakat santri ke dalam masyarakat kelas menengah atas. Perubahan pada kelas pada gilirannya mengarah pada perubahan tingkat wacana dan persepsi sosial maupun politik kenegaraan. Oleh karena posisi sosial ekonomi keluarga mereka sebagai bagian penting dari golongan menengah, mereka memiliki kecenderungan alamiah untuk tertarik pada kegiatan dan gerakan yang berhaluan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat (society) vis a vis negara (state).

Semakin menguatnya kedudukan kelas menengah muslim dari pelbagai kalangan dan aneka profesi telah turut makin menentukan corak dan aneka macam tuntutan sosial dan cita-cita hidup mereka. Hal ini secara langsung berkaitan dengan kebutuhan terhadap pranata-pranata baru, institusi-institusi baru sebagai wahana-wahana artikulasi terhadap aspirasi dan tuntutan baru yang telah berkembang di antara mereka. Dengan demikian pembangunan tidak saja telah merubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat, namun juga persepsi dan konasi mereka terhadap lingkungan; bangsa dan terlebih kebutuhan artikulasi keagamaan.

Ada beberapa perubahan cukup kentara di tengah ummat Islam, yang dapat diamati sebagai konsekwensi logis pembangunan yang digulirkan pemeritahan ORBA itu. Terutama perubahan pada peta sosiologis ummat dengan telah terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan ummat Islam. Konvergensi itu merupakan proses dialektika historis yang terjadi di antara kaum muslimin, yang meminjam konsep Geertz di awal, umumnya dikenal sebagai ummat yang terpolarisasi ke dalam trikotomi. Dengan kata lain trikotomi antara berbagai kalangan dan lapisan sosial masyarakat yang telah sekian waktu bertahan dan melekat kini kian pudar.

Perubahan dan pergeseran yang terjadi pada lapisan sosiologis masyarakat sebagai bagian logis akibat dari proses dialektik itu tidak hanya terjadi pada level kategorisasi di atas namun juga menyentuh aspek yang lebih luas. Kuntowijoyo<sup>(4)</sup>,

---

<sup>4</sup>. Bagi Kunto tentang telah mencairnya polarisasi ummat itu tidak dapat dipisahkan dari dinamika makro perjalanan sejarah ummat secara keseluruhan yang telah mengalami pergeseran. Yang utama dan paling penting dari teori-teorinya mengenai



mencatat beberapa pergeseran penting dalam hal kategori atau dikotomi keberagaman masyarakat yang dikenal selama pemeritahan ORBA.

Diantaranya; pertama, dikotomi budaya santri-abangan sudah mencair atau berakhir. Proses perubahannya sendiri dimulai sejak diberlakukannya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dengan demikian secara praktis anak-anak orang abangan mendapatkan basis pendidikan agama yang sama. Sementara itu pada saat bersamaan pengembangan pendidikan umum di pesantren-pesantren telah menghilangkan eksklusifisme budaya di kalangan anak-anak santri.

Kedua, implikasi sosiologis akibat perubahan di tingkat pertama pada gilirannya menghadirkan tatanan sosial kaum muslimin yang egaliter, terutama terhadap adanya stereotip tradisionalis-modernis. Terutama setelah digunakannya buku standar pemerintah secara nasional di semua tingkat pendidikan agama. Demikian pula semakin luasnya peredaran penerbitan-penerbitan buku keagamaan secara bebas tanpa mengenal aliran keagamaan.

---

hal ini barangkali adalah gagasannya tentang tiga tahapan periode sejarah ummat. Hingga dewasa ini menurut Kunto ummat telah melewati tiga jaman. Pertama periode Mitos, Ideologi dan Ide. Pada periode pertama, Islam lebih dimaknai sebagai mitos, yakni ajaran yang lebih dekat dengan kekuatan magis dan suprarasional. Pada periode Ideologi Islam hendak dijadikan sebagai dasar negara. Juga sebagai simbol formal institusi ke-Islaman, seperti Partai Politik Islam. Sementara itu pada periode dewasa ini Islam lebih tampil sosoknya sebagai ide, sebagai nilai dan Ilmu yang dapat dipelajari secara terbuka serta dapat mewarnai dan menjadi inspirasi nilai bagi solusi program-program kemasyarakatan. Upaya menjadikan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin itu mesti dicapai secara alami, kultural dan persuasif. Bukan dengan jalan struktural dan politik konfrontatif. (Lihat; Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Ummat Islam Indonesia Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Ketiga, semakin menipisnya dikotomi antara ulama dan cendekiawan. Kenyataan akan hal ini dapat secara gamblang diamati pada makin tiadanya jarak psikologis yang memisahkan antara terminologi ulama, kyai dengan kaum intelektual produk lembaga-lembaga pendidikan sekular. Mereka ini umumnya dikenal sebagai lapisan cendekiawan. Antara keduanya kini dapat bergandengan tangan dalam membahas dan mendialogkan berbagai tema kemanusiaan dan pembangunan. Tidak sedikit para cendekiawan yang fasih menyitir ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian juga sebaliknya banyak Kiyai yang tidak ragu-ragu ketika mempergunakan logika-logika pengetahuan ilmiah sebagai penjelas gagasan dan ide keagamaan serta tidak asing dengan idiom-idiom modernitas.

Keempat, dikotomi antara kaum agama dan kaum sekular juga sudah berakhir. Kini betapa banyak intelektual muslim yang mengurus masalah-masalah yang sebelumnya tak terbayangkan yang dipersepsi sebagai persoalan non agama. Persoalan lingkungan hidup, kependudukan, olah raga atau bahkan kesenian, kini tidak identik lagi sebagai urusan yang harus ditinggalkan hanya karena persepsi bahwa itu adalah lahan orang-orang sekular yang *non* agama. Orang-orang yang dulu dikenal sekular, kini juga terdapat kecenderungan untuk menampakkan watak agama lebih religius, sehingga batas-batas antara sekularitas dan agama mulai dipertanyakan.

Kelima, berlakunya Undang-undang keormasan pada 1985 telah mengakhiri dikotomi antara partai Islam dan non Islam. Para ulama dan pimpinan ormas

ke-Islaman cenderung memberikan kebebasan ummatnya dalam menentukan pilihan artikulasi dan penyaluran aspirasi politiknya.

Dengan kata lain telah terjadi perubahan peta sosiologis ummat atas dasar pengelompokan persepsi dan aktualisasi konsep keberagamaan. Perubahan ini dapat dilacak pada beberapa proses sosial yang terjadi dalam skala besar dengan variabel internal dan eksternal yang saling mendukung. Dengan demikian ia bukanlah terjadi secara simultan sebagai sesuatu yang serta merta tanpa didahului variabel yang mengantarai, yaitu dinamika sosial ummat yang itu tidak selalu berjalan datar tanpa hambatan, namun sebaliknya acapkali diwarnai ketegangan-ketegangan psikologis yang terjadi mengiringi proses itu.

Ketegangan itu dalam perspektif teoritis, terjadi ketika antara pelbagai stratifikasi kaum muslimin, baik pada dimensi sosiologis, ekonomis maupun politis, itu dihadapkan pada konsep pembangunan yang digulirkan oleh pemerintahan orde Baru, yang *nota bene* mengacu dan berkiblat pada model paradigma pembangunan ala Barat. Terhadap persoalan ini terdapat beragam pandangan dan responsi yang diajukan oleh kaum muslimin yang tentu saja dipengaruhi dan diwarnai oleh perbedaan tingkat dan ragam wacana pendidikan dan stratum ekonomi. Di samping juga dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap dua hal tersebut yang levelitasnya bertingkat-tingkat. Meskipun demikian secara global terdapat titik temu kesamaan sebagai benang merah yang menghubungkan antar beragam kelompok tersebut dalam

menanggapi persoalan modernisasi sebagai agenda yang tidak dapat "didiamkan" begitu saja, alias mesti diresponi.

Minimal, dalam hal ini, terdapat tiga kerangka persepsi dan responsi yang muncul ketika ummat Islam sebagai mayoritas bangsa dihadapkan pada proyek raksasa yang dinamakan pembangunan dengan kata kunci yang menitik tekankan pada modernisasi<sup>(5)</sup>. Pertama, pembangunan atau modernisasi dilihat sebagai sustu proses penyebaran nilai-nilai yang sejalan dengan ekspansi kekuatan ekonomi dan politik Barat. Sebagian dari nilai-nilai modernisasi itu dapat dipandang universal yang

---

<sup>5</sup>. Dalam pandangan teoritisasi Barat, ada anggapan bahwa perubahan ke arah modernisasi yang terjadi di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah proses dari luar (exogenous). Proses itu diawali dengan penyebaran nilai-nilai modern ke dalam tatanan tradisional. Hal ini terbalik dengan sejarah modernisasi yang terjadi di negara-negara yang kini telah modern. Pada awalnya mereka menjadi modern bukan hasil dari sesuatu yang dicangkokkan dan diimpor dari negara lain. Tapi melalui perkembangan dari dalam dirinya sendiri (endogenous). Karena di negara dunia ke tiga proses itu dicangkokkan, maka dalam sisi tertentu terjadilah benturan tradisi, institusi maupun nilai-nilai setempat. Dalam kenyataannya ketika negara berkembang tadi ingin melakukan mdernisasi, maka mereka melalui elit yang telah mendapatkan pendidikan Barat, harus mengambil alih dan mengadaptasi tekhnologi Barat dan sekalian mengasimilasi nilai-nilai, pola tindakan, dan lembaga-lembaga yang kini dikenal di negara-negara industri maju. Benturan yang terjadi sebagai implikasi proses pencangkokan itu dapat berupa terbongkarnya budaya atau nilai setempat. Agama sebagai bagian dari nilai yang hidup juga tidak terlepas dari pengaruh ini, sehingga acapkali terjadi semacam "protes" atau mungkin terkesan apologis dari masyarakat. Dawam Rahardjo mencatat setidaknya terdapat dua macam argumentasi di balik protes itu. *Pertama*, teori modernisasi itu sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek teknikalitas tentang perubahan dan perkembangan masyarakat. Tapi juga preferensi ideologi dan nilai-nilai, atau sistem sosio-kultural masyarakat Barat. *Kedua*, Teori modernisasi pada umumnya mendasarkan diri pada suatu orientasi menuju kepada suatu masyarakat tipe ideal yaitu masyarakat kapitalis modern. (lihat, Modernisasi sebagai masalah Ummat, dalam Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Mizan, Bandung, 1994, hlm. 371)

mengatasi batasan-batasan lingkup geografis dan kultural antara kawasan sosiologis masyarakat ataupun etnis masyarakat yang berbeda, tetapi di sisi lain juga bersifat etnosentris Eropa Barat atau Amerika Utara. Dari sudut ini modernisasi pada umumnya dipersepsi sebagai proses transnasionalisasi yang berkaitan dengan perkembangan kapitalisme dan westernisme. Di sini dalam tanggapan ummat Islam dan bangsa Indonesia, bahkan negara-negara ketiga umumnya, unsur-unsur modernisme perlu dipilahkan antara yang bersifat universal dan yang mengandung kecenderungan etnosentrisme.

Kedua, modernisasi dilihat sebagai sebagai keharusan sejarah yang akan melanda seluruh dunia, dan karena itu perlu ditanggapi, lepas antara suka atau tidak duka (*like and dislike*). Berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Barat, perubahan akan bergerak dari pola agraris ke pola industrial. Mau tidak mau nilai-nilai tradisional yang tidak kompatibel terhadap proses industrialisasi akan ditinggalkan atau akan tergilas begitu saja dengan sendirinya. Karena itu tradisi harus dipertimbangkan termasuk persepsi keagamaan yang akan menyangkut pula persoalan theologis, sistem hukum dan kelembagaan serta perilaku masyarakat.

Pandangan ketiga mencoba menilai lebih kritis terhadap persoalan modernisasi maupun juga tradisi. Modernisasi agaknya memang merupakan taqdir sejarah. Namun bagaimanapun juga modernisasi tidak dapat ditanggapi secara *a-historis*, terlepas dan terpisah dari konteks nilai-nilai sosialnya. Karena itu yang perlu diamati adalah sejarah

dan proses perubahan sosial itu sendiri, dari mana pilihan-pilihan tertentu harus dilakukan, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Demikian pula dalam kerangka yang sama, digunakan untuk mencermati tradisi. Tradisi perlu dipertimbangkan daripada dicurigai. Sebab bagaimanapun, di Dunia ketiga, tradisi adalah bagian dari sejarah yang memberikan konteks dalam proses perubahan nilai.

Perbedaan pada level persepsi dan penilaian terhadap proses pembangunan pada gilirannya melahirkan pula respon yang berbeda. Pada kerangka pertama respon itu telah melahirkan kreatifitas-kreatiofitas tersendiri. Di satu sisi berkembang pemikiran-pemikiran yang bersifat kritik terhadap gagasan-gagasan yang dianggap Barat, terutama persoalan sekularisme yang menggeser peranan agama, dan di lain pihak ada desakan untuk mencari kembali nilai-nilai Islam guna menghadapi proses sekularisasi. Persepsi sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka kedua telah menimbulkan sikap praktis dalam melihat proses modernisasi. Dalam hal ini kaum cendekiawan muslim mengintegrasikan diri ke dalam birokrasi dan melakukan hal-hal yang sifatnya tekhnokratis daripada intelektual. Dalam perkembangan kemudian kaum muslimin juga, berdasarkan sikap yang sama mulai banyak yang memasuki dunia bisnis dan melakukan hal yang sifatnya profesional dan manajerial.

Pada kerangka ketiga dari macam-macam persepsi itu telah menimbulkan paling tiga macam kegiatan. *Pertama* adalah kegiatan advokasi sebagai terjemahan dari pemikiran yang memandang perlunya perubahan "struktur atas" yang berwujud

kesadaran, ideologi, sistem pikiran atau juga yang theologis sifatnya. Pertimbangan intelektual yang mendalam memang kurang diperhatikan karena yang diandalkan adalah aksi-aksi sehat *common sense* yang dapat ditarik dari hasil pemantauan keadaan sikap masyarakat sehari-hari.

Pola kegiatan *kedua* diwujudkan dalam bentuk tindakan kongkrit yang bersifat praktis. Ini adalah upaya yang didasarkan pada pandangan bahwa perubahan pada tingkat basis sosial adalah yang paling utama. Di sini pertimbangan intelektual juga kurang diperlukan karena dari berbagai analisis ilmiah yang akan diambil adalah dimensi praktisnya saja. Kegiatan ini bersifat mengintegrasikan diri dengan masyarakat dengan jalan terjun langsung ke masyarakat level bawah.

Pola *ketiga* mengarah pada kegiatan intelektual murni. Kegiatan ini mengandalkan adanya independensi orang bersangkutan dari struktur kekuasaan dan sumber penghasilan. Posisi ini umumnya sulit dicapai, sehingga jarang dijumpai seseorang yang sepenuhnya mampu memerankan diri sebagai intelektual bebas. Meskipun begitu pandangan kritis yang dilandasi kebebasan berfikir tidak jarang muncul dalam kasus yang berbeda dan dari lingkungan yang berbeda pula, baik yang datang dari perguruan tinggi, LSM, LPSM, lembaga studi maupun penelitian.

Pola-pola aksi dan pemikiran di atas sebenarnya khas kemunculannya dalam lingkungan kaum santri sebagai perkembangan dari kian naiknya posisi kaum terdidik santri. Dalam hal ini kemudian posisi teknokrat muslim lebih dominan

perkembangannya ketimbang kaum intelektualnya. Salah satu sebabnya adalah frustrasi yang timbul dalam kehidupan berwiraswasta, baik dalam bisnis pada umumnya, termasuk di bidang usaha kecil maupun pertanian. Kesulitan dalam kehidupan sebagai swasta mendorong keluarga muslim santri untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan konsekwensi biaya berapapun agar anak-anak mereka dapat rampung sekolahnya dan menjadi pekerja profesional atau pegawai negeri.

Tapi "panen besar" golongan muslim terdidik atau biasanya dikenal dengan generasi *neo santri*, baru terjadi pada dasawarsa 1970-an. Mereka mula-mula memasuki pemerintahan maupun dunia perguruan tinggi sebagai dosen dengan patronase senior mereka. Sebagian juga memasuki bisnis sebagai profesional. Dalam proses inilah mulai mencair beberapa dikotomi santri-priyayi, baik dalam persepsi maupun dalam kenyataan sosial. Dalam dasawarsa 1980-an, mereka mulai memasuki jenjang kepangkatan menengah dalam pemerintahan maupun manajer dalam perusahaan bahkan mulai menduduki posisi manajemen puncak dalam bisnis dan profesi-profesi lainnya.

Kaum jenis ini memang umumnya kurang begitu "vokal" dan kritis terhadap jalannya pembangunan. Antara lain mungkin disebabkan adanya trauma terhadap "Negara Islam" dan mitos "pembangkangan kaum santri" terhadap birokrasi yang dalam dasawarsa 1970-1980-an diperkuat dengan adanya sejumlah pergolakan sosial yang selalu dicap atau diasosiasikan dengan gerakan mendirikan "mendirikan Negara



Islam" atau gerakan "ekstrem kanan" walaupun latar belakang persoalannya adalah keresahan sosial-ekonomi. Dalam situasi seperti itu mereka menghindari kritik terhadap pemerintah dan karena itu telah banyak kehilangan sikap kritis sebagai intelektual. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki lebih sebagai *social engineering* daripada sebagai alat analisa yang kritis. Bahkan alat analisa kritis itupun lebih banyak dalam kerangka legitimasi terhadap kekuasaan daripada sebagai metode kritik.

Dalam perspektif dan cara pandang serupa, maka masih terjadi polemik mengenai kemunculan "kelas menengah" baru dalam arti yang sesungguhnya dalam tubuh kaum muslimin Indonesia. Tergantung dari sisi mana memandangnya, dan untuk keperluan apa kesimpulan akan definisi kelas tengah itu disepakati sebagai kelas tersendiri dalam komunitas kebangsaan yang menduduki peran strategis yang di pundaknya beban transformasi sosial itu dipikulkan.

Apabila mengacu konsep kelas menengah seperti umumnya terdapat di negara-negara Barat, konsep kelas menengah kita masih *debatable*, alias belum menemukan sosok kongkritnya. Karena di negara-negara tersebut kelas menengah adalah suatu lapisan yang tidak saja independen terhadap negara dari sudut hubungan bisnis namun juga secara politis.

Dalam menjalankan usahanya kelompok ini banyak merekrut tenaga-tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu. Ahli ekonomi, insinyur, kedokteran dan lainnya merupakan kelas menengah baru yang mengintegrasikan diri mereka dengan kalangan

dunia usaha. Kelompok-kelompok profesional ini akhirnya juga sangat bergantung dan sulit tampil sebagai kelompok "strategic group"<sup>(6)</sup>, kelompok minoritas kritis (*critic minority*) yang bersuara vokal terhadap kekuasaan.

Dalam hal ini agaknya yang dapat diharapkan sebagai penghela perubahan adalah kelas menengah yang lahir dari golongan intelektual. Mereka relatif lebih mandiri dan memiliki ruang gerak agak bebas untuk melancarkan kritik terhadap segi-segi kehidupan sosial politik yang dirasakan penuh ketimpangan.

Bagi kelas menengah santri selain kehidupan sosial umumnya, bidang keagamaan juga mendapat perhatian mereka. Dari segi inilah kelas menengah santri akan dilihat perannya sebagai kelompok pendorong perubahan <sup>(7)</sup>. Berbeda dengan kelompok menengah lama, kelas menengah santri baru (*neo santri*) lahir bersamaan dengan meluasnya jaringan kegiatan kemasyarakatan. Karena itu kelas menengah

---

<sup>6</sup>. Di antara Kelas Menengah itu yang lebih independent dan otonom dari kekuasaan adalah kaum intelektual. Hal ini karena dari sisi ekonomi kehadiran mereka relatif tidak terjangkau oleh kekuasaan. Mereka adalah kaum yang tidak secara langsung bergantung secara ekonomi kepada kekuasaan. Dengan suara-suara moralnya kelompok ini relatif berani secara terbuka melontarkan kritik dan korektif terhadap kekuasaan. Bahkan diitopang oleh komitmen dan tanggungjawab moral kecendekiaan terhadap posisinya sebagai *Creative Minority*, mereka kerap berani berposisi *vis a vis* dalam melihat dan mempersepsi suatu kasus tertentu. Dawam Rahardjo menyebut model kaum ini sebagai intelektual bebas. Terminologi ini untuk membedakan dengan kaum intelektual profesional. Yang disebut terakhir adalah mereka yang berpendidikan tinggi disamping memiliki keahlian dan bekerja secara profesional sesuai dengan keahlian itu. Strategic Group dalam kaitan ini adalah untuk menyebut kelas menengah intelektual (lihat; Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Mizan, Jakarta, 1994).

<sup>7</sup>. Sudirman Teba, *Opcit*, hlm. 260.

sangat bervariasi, antara lain kaum intelektual, mahasiswa, pengusaha, politisi dan kelompok-kelompok profesional<sup>(\*)</sup>.

Mereka inilah yang memiliki tuntutan dan kebutuhan kian beragam, tidak saja sebagai keniscayaan meningkatnya kebutuhan primer sehingga mesti dibutuhkan perluasan peran hingga pada dimensi sekunder dari aneka keperluan lebih terbuka terhadap wacana sosial politik. Namun terlebih adalah peran-peran sosial politik itu menuntut kreatifitas dan penumbuhan wadah-wadah kelembagaan baru yang sanggup menopang aneka dimensi stratumnya sebagai wahana aktualisasi dan artikulasi kepentingan kelasnya yang tidak dapat lagi ditampung oleh institusi-institusi tradisional.

Termasuk di antaranya adalah wadah-wadah intelektual dengan model dan gaya pendekatan yang berbeda dengan model kebanyakan yang terdapat di masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebutuhan dakwah, kaum muslim menengah memerlukan wadah dakwah yang berbeda dengan umumnya wadah-wadah dakwah. Bukan karena kebutuhan akan eksklusifitas yang mencirikan kelompok mereka, tapi yang disesuaikan dengan pengaturan waktu dan kesempatan telah menghantarkan mereka pada keharusan untuk menciptakan wadah itu dengan formula baru.

Dawam Rahardjo, dalam hal ini, melihat adanya tiga ciri yang biasa terdapat pada konsep tentang dakwah untuk kelas menengah ini. Pertama, dakwah kelas menengah harus dibedakan dengan dakwah pada lapisan masyarakat tingkat bawah.

---

<sup>8</sup>. M. Syafi'i Anwar, *Aksi-aksi Islam Orde Baru*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 15.

Di kalangan ini dakwah harus dilakukan dengan mengajak berfikir dan dengan mempergunakan idiom-idiom modern.

Kedua, di kalangan professional yang bekerja di birokrasi, di kantor-kantor yang sudah terbiasa dengan cara berfikir rasional, justru menghendaki hal-hal lain yang bersifat komplementer, yakni spiritualisme. Mungkin yang lebih cocok bagi mereka bukan lagi argumen-argumen rasional, melainkan bahan-bahan tasawuf. Dan ketiga, yang dibutuhkan kelompok ini justru kemampuan melaksanakan ritus yang paling dasar, seperti shalat, berdo'a atau melakukan wirid atau mungkin juga kemampuan melakukan khutbah.

Apabila dicermati hal yang turut membedakan barangkali adalah dalam hal pemilihan lokasi. Dakwah kelas menengah juga menawarkan usulan-usulan pengajian bulanan di hotel-hotel berbintang yang biasanya untuk menarik kalangan borjuis. Tetapi mereka harus membayar untuk sebuah ceramah ilmiah. Kalangan inilah antara lain yang turut meramaikan pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim.